

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 2 2025
Hal. 387-397
DOI: 10.58784/rapi.356

Risca Lumintang

Corresponding author:
riscaa05@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Jenny Morasa

Sam Ratulangi University
Indonesia

Wulan Deisy Kindangen

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 26 July 2025
Revised 7 August 2025
Accepted 11 August 2025
Published 12 August 2025

ABSTRACT

The Regional Government Information System (SIPD) is a digital platform mandated by the Ministry of Home Affairs to improve the transparency and efficiency of regional development planning and financial management. This study aims to evaluate the implementation of SIPD at the Regional Development Planning and Research Agency (Bappelitbangda) of Kotamobagu City, focusing on how the system supports development planning and financial reporting. Using a qualitative descriptive method, data were collected through in-depth interviews with key informants, observation, and documentation. The findings reveal that despite SIPD's potential benefits in streamlining planning and budgeting processes, its implementation remains suboptimal due to limited human resource capacity and confusion regarding program nomenclature changes. As a result, the agency still frequently relies on the older SIMDA system. Theoretically, this research contributes to the literature on public sector accounting systems in developing countries. Practically, it underscores the need for enhanced training and system familiarization to ensure effective SIPD utilization. Further research is recommended to explore SIPD implementation across diverse types of regional agencies.

Keywords: development planning; information system; local government; public financial management
JEL Classification: H83, M41

©2025 Risca Lumintang, Jenny Morasa, Wulan Deisy Kindangen



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah di berbagai negara untuk mengimplementasikan e-government sebagai upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia, penerapan e-government diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan secara Elektronik, yang salah satunya diwujudkan dalam pengembangan Sistem Informasi

Pemerintah Daerah (SIPD) sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019. SIPD dirancang untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang relevan bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Sebelum diberlakukannya SIPD, banyak pemerintah daerah, termasuk Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Kotamobagu, menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). SIMDA telah membantu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja, namun kebijakan terbaru mewajibkan migrasi ke SIPD agar data pembangunan, informasi keuangan, dan dokumen perencanaan terintegrasi secara nasional. Migrasi sistem ini tidak hanya menuntut kesiapan infrastruktur teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia serta adaptasi terhadap perubahan nomenklatur program dan proses kerja baru.

Beberapa penelitian sebelumnya menyoroti manfaat SIPD dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Nasution & Nurwani, 2021; Dela & Juliana, 2022). Namun, temuan-temuan tersebut umumnya berfokus pada aspek teknis atau evaluasi kinerja di instansi yang sudah relatif siap secara SDM dan infrastruktur. Sementara itu, masih terbatas kajian yang secara spesifik mengevaluasi penerapan SIPD di instansi yang sebelumnya bergantung pada SIMDA, terutama pada konteks daerah dengan tantangan adaptasi nomenklatur program dan keterbatasan kapasitas pegawai. Penelitian Vitriana et al. (2022) melakukan analisis penerapan SIPD dan menyimpulkan bahwa penerapan sistem ini belum efektif. Kondisi ini

menunjukkan adanya research gap terkait pemahaman mendalam mengenai hambatan implementasi SIPD dan implikasinya terhadap proses perencanaan pembangunan serta pelaporan keuangan daerah di daerah berkembang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan SIPD pada Bappelitbangda Kota Kotamobagu, dengan fokus pada bagaimana sistem ini mendukung proses perencanaan pembangunan dan pelaporan keuangan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian sistem informasi sektor publik di negara berkembang, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi SIPD di lingkungan pemerintah daerah.

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi pemerintahan

Pengertian atau definisi akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Akuntansi adalah proses identifikasi, ukur, catat dan lapor, yang sebelumnya merupakan informasi dalam bukti transaksi kemudian diolah dan menjadi laporan keuangan. Proses pencatatan transaksi keuangan pada akuntansi sangat dibutuhkan karena nantinya proses tersebut akan menghasilkan laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan (Hanggara, 2019).

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi sisi, dan berdasarkan standar yang diakui umum (Bahri, 2016). Akuntansi sebagai

system informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan (Nur, 2020).

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi, membuat pilihan-pilihan nalar di antara berbagai alternatif arah tindakan (Halim dan Kusufi 2007). Akuntansi adalah disiplin ilmu atau teknik-teknik yang berfungsi untuk menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai kejadian-kejadian suatu entitas atau organisasi untuk membantu para pemangku kepentingan dalam pembuatan keputusan (Supriyono, 2018).

Menurut Hantono et al. (2021) akuntansi sektor publik adalah suatu proses dari pengumpulan, pengklasifikasian, analisis serta membuat laporan pengelolaan keuangan yang akan digunakan oleh lembaga sektor publik dengan tujuan memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan jika nantinya akan mengambil suatu keputusan. Akuntansi sektor publik merupakan aktivitas yang terjadi dalam sektor pemerintahan yang mengulas kejadian-kejadian akuntansi dalam pengelolaan keuangan baik itu mencatat, mengklasifikasi dan melaporkan transaksi bahkan keuangan pemerintah dengan tujuan memberikan informasi yang akuntabilitas dan transparansi (Dela dan Juliana, 2022).

Menurut Hasanah dan Fauzi (2017), akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan. Akuntansi pemerintahan adalah suatu prosedur pencatatan, pengklasifikasian, serta pelaporan yang diterapkan dalam

lembaga pemerintahan yang prosedurnya bisa secara manual maupun terkomputerisasi. Akuntansi publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018).

Perkembangan akuntansi sektor publik terutama di pemerintahan ini ditandai dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah, Menurut Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Adanya SAP mendorong proses penerapan keuangan pada daerah-daerah ke arah yang lebih baik. SAP menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah dalam penilaian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada badan atau entitas pemerintah. Mempermudah dalam menjalankan fungsi perencanaan dan pengelolaan dana untuk kepentingan masyarakat.

Sistem informasi

Menurut Tukino dan Amrizal (2017) sistem informasi dapat berfungsi dengan baik jika antar komponen yang ada dapat saling terkait satu dengan yang lain, sehingga sistem dapat memberikan dan

menghasilkan suatu informasi yang detail, cepat, akurat, terpercaya serta relevan dan berguna bagi suatu pihak yang memerlukan informasi. Sumber dari suatu informasi adalah data. Sistem informasi didefinisikan sebagai seperangkat komponen atau elemen yang terintegrasi dan bertugas untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data yang terhubung untuk mencapai suatu tujuan.

Sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya (manusia dan komputer) untuk mengubah masukan (input) menjadi keluaran (informasi) guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan (Suryadharma dan Budyastuti, 2019). Sistem informasi adalah sistem yang terorganisir untuk pengumpulan, organisasi, penyimpanan dan komunikasi informasi (Supriyadi, 2020).

Sistem informasi didefinisikan sebagai sekumpulan yang saling berhubungan, mengumpulkan, atau mendapatkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan, dan proses manajemen dalam suatu organisasi. Serta membantu Analisa permasalahan dan inovasi baru (Ahmad dan Munawir, 2018).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Adapun yang termasuk dalam SIPD yaitu informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1. **Informasi Pembangunan Daerah**
Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah. Informasi Pembangunan Daerah ini akan dikelola langsung oleh Bappeda.
2. **Informasi Keuangan Daerah**
Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik. Sumber-sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah
3. **Informasi Pemerintah Daerah Lainnya**
Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi pemerintahan daerah lainnya memuat:
 - a. **Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);**
Informasi LPPD diperoleh dari hasil pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis elektronik.
 - b. **Informasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD);**
Informasi EPPD diperoleh dari hasil EPPD yang dilakukan dalam EPPD berbasis elektronik.
 - c. **Informasi Perda.**
Informasi Perda merupakan hasil dari penetapan Perda.

3. Metode riset

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan menganalisis data non-numerik yang berupa kata-kata yang akan

diolah menjadi informasi. Jenis penelitian menggunakan pendekatan studi kasus karena penelitian ini hanya berfokus pada hasil penelitian yang dijabarkan melalui tulisan atau gambar seperti pengamatan, wawancara dan penelaan dokumen. Sumber data dari penelitian kualitatif yaitu berupa tulisan-tulisan dan dari penyampaian lisan yang dikumpulkan oleh penulis secara langsung dan dapat dipercaya kemudian akan diamati dan diolah oleh penulis. Sumber data yang berasal dari data primer akan diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung yaitu kepala badan, bendahara dan kepala bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Metode analisis data adalah upaya penulis untuk dapat mengolah data serta dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk dapat menjadi informasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses analisis dilakukan dengan mengumpulkan data yang sebelumnya masih bersifat mentah, mengklasifikasi dan mengelompokkan data, penyederhanaan dan mengolah data, melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan menyangkut judul yang diteliti.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Sistem informasi pemerintah daerah dalam informasi pembangunan daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bappelitbangda Kotamobagu diperoleh informasi bahwa data perencanaan pembangunan daerah mencakup informasi proyek-proyek infrastruktur, alokasi anggaran, kebijakan pembangunan, dan potensi ekonomi daerah. Data ini disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau dokumen perencanaan.

Informasi ini memuat detail prioritas pembangunan, target pencapaian, serta strategi yang akan diterapkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di suatu daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Bappelitbangda Kotamobagu diperoleh informasi bahwa analisis profil dan pembangunan daerah melibatkan evaluasi data demografis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Identifikasi potensi dan tantangan, serta implementasi strategi pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sebagai tujuan penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda Kotamobagu diperoleh informasi bahwa informasi pembangunan daerah membahas mengenai perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan proses penyusunan rencana strategis untuk pengembangan wilayah, termasuk infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kotamobagu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk merumuskan rencana yang mencakup kebutuhan dan potensi lokal. Proses ini melibatkan analisis data, partisipasi masyarakat, dan evaluasi dampak lingkungan.

Sistem informasi pemerintah daerah dalam informasi keuangan daerah

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bappelitbangda Kotamobagu diperoleh informasi bahwa perencanaan daerah melibatkan pengembangan aspek seperti tata ruang, transportasi, lingkungan, dan sosial. Sistem keuangan daerah mencakup proses anggaran, pelaksanaan pengeluaran, dan penatausahaan pendapatan. Pemerintah daerah menyusun anggaran tahunan mencakup rencana pengeluaran dan pendapatan. Proses ini melibatkan penyusunan program, kegiatan, dan

alokasi dana. Setelah anggaran disetujui, pemerintah daerah melaksanakan pengeluaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan melibatkan proses pembayaran untuk berbagai kegiatan dan proyek.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara pada Bappelitbangda Kotamobagu diperoleh informasi bahwa pendapatan daerah berasal dari pajak, retribusi, dan dana transfer. Penatausahaan pendapatan melibatkan pencatatan penerimaan dan pemantauan sumber-sumber pendapatan. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala yang mencakup neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Keuangan daerah sering diaudit oleh pihak eksternal untuk memastikan

kepatuhan, transparansi, dan akurasi informasi keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda Kotamobagu diperoleh informasi bahwa informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang melibatkan pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kotamobagu mengikuti standar akuntansi yang ditetapkan, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia. Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah terdapat dalam laporan keuangan daerah yang disusun secara berkala.

Tabel 1. Neraca

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	500.000	215.250
JUMLAH ASET LANCAR	500.000	215.250
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin	2.800.100.390	2.834.966.390
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.380.000	10.380.000
Aset Tetap Lainnya	7.347.441.146	7.347.441.146
Akumulasi Penyusutan	(2.429.630.260,51)	(2.405.671.705,29)
JUMLAH ASET TETAP	7.728.291.275,49	7.787.115.830,71
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud Lainnya	120.000.000	90.000.000
Aset Lain-lain	116.345.186,67	116.345.186,67
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(93.000.000,00)	(90.000.000,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	143.345.186,67	116.345.186,67
JUMLAH ASET	7.872.136.462,16	7.903.676.267,38
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Belanja	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN	0	0
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	7.872.136.462,16	7.903.676.267,38
JUMLAH EKUITAS	7.872.136.462,16	7.903.676.267,38
JUMLAH EKUITAS	7.872.136.462,16	7.903.676.267,38
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7.872.136.462,16	7.903.676.267,38

Sumber: Bappelitbangda Kotamobagu, 2025

Tabel 2. Laporan perubahan ekuitas

URAIAN	2022	2021
Ekuitas Awal	7.903.676.267,38	8.172.674.372,15
Surplus/Defisit-LO	(5.900.598.352,22)	(5.277.985.778,34)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: Koreksi Ekuitas	747.500,00	(168.356.196,43)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	5.868.311.047,00	5.177.343.870,00
Ekuitas Akhir	7.872.136.462,16	7.903.676.267,38

Sumber: Bappelitbangda Kotamobagu, 2025

Sistem informasi pemerintah daerah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kotamobagu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bappelitbangda Kotamobagu diperoleh informasi bahwa SIPD adalah rangkaian perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengakses informasi terkait administrasi, layanan publik, keuangan, dan kebijakan di tingkat lokal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan SIPD masih kurang efektif karena kurangnya pemahaman terhadap aplikasi SIPD dan perubahan nomenklatur program kegiatan yang membingungkan dalam proses penyusunan dokumen RKPD maka yang digunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebagai pendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Bappelitbangda Kotamobagu diperoleh informasi bahwa SIPD bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dalam menjalankan berbagai operasi pemerintahan, memperkuat transparansi dengan menyediakan akses informasi yang lebih baik kepada masyarakat, memberikan layanan publik yang lebih baik dan responsif dengan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses dan memberikan akses lebih mudah kepada warga.

Manfaat internal lainnya yaitu memungkinkan pemantauan, kinerja pemerintah daerah secara *real-time*, mengintegrasikan data dari berbagai departemen dan unit pemerintah untuk menyajikan gambaran yang lebih lengkap

dan akurat, mempermudah pengelolaan anggaran dan keuangan daerah, memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan strategis dengan menyediakan analisis data yang mendalam, membantu dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur dengan menyediakan data yang dibutuhkan untuk proyek-proyek pembangunan, memudahkan proses pelaporan pemerintah, memastikan keselarasan antara berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah tetapi penerapan SIPD yang dilakukan masih kurang efektif karena kurangnya pemahaman terhadap aplikasi SIPD dan perubahan nomenklatur program kegiatan yang membingungkan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maka instansi menggunakan SIMDA sebagai pelengkap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda Kotamobagu diperoleh informasi bahwa faktor pendukung SIPD meliputi ketersediaan sumber daya, partisipasi pemangku kepentingan, infrastruktur teknologi, keamanan informasi, sosialisasi dan pelatihan, kebijakan dan regulasi, komitmen pemimpin, integrasi dengan sistem yang ada, monitoring dan evaluasi. Kualitas output dari SIPD diukur berdasarkan akurasi informasi, keandalan sistem, ketersediaan data, dan kecepatan respons. Evaluasi melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap kebutuhan pengguna, integrasi data yang efektif, serta pemeliharaan keamanan informasi yang

memadai. Penerapan SIPD masih kurang efektif karena Bappelitbangda Kotamobagu kurang memahami penggunaan aplikasi SIPD dan sering terjadi perubahan nomenklatur program kegiatan dalam proses penyusunan dokumen RKPD maka sering menggunakan SIMDA sebagai pendukung.

Pembahasan

Sistem informasi pemerintah daerah dalam informasi pembangunan daerah

Berdasarkan hasil penelitian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kotamobagu mengenai SIPD dalam informasi pembangunan daerah yaitu membahas mengenai data perencanaan pembangunan daerah yang mencakup berbagai informasi, seperti proyek-proyek infrastruktur, alokasi anggaran, kebijakan pembangunan, dan potensi ekonomi daerah. Data ini biasanya disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau dokumen perencanaan. Dalam data tersebut, terdapat detail mengenai prioritas pembangunan, target pencapaian, serta strategi yang akan diterapkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di suatu daerah. Analisis profil dan pembangunan daerah melibatkan evaluasi data demografis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Identifikasi potensi dan tantangan, serta implementasi strategi pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sebagai tujuan penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah melibatkan proses penyusunan rencana strategis untuk pengembangan wilayah, termasuk infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kotamobagu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk merumuskan rencana yang mencakup kebutuhan dan potensi lokal. Proses ini melibatkan analisis data, partisipasi masyarakat, dan evaluasi dampak lingkungan. Dengan SIPD, proses

pembangunan daerah menjadi lebih transparan dimana masyarakat bisa memantau kegiatan dan anggaran pembangunan serta pengawasan oleh DPRD, BPK, dan masyarakat menjadi lebih mudah karena informasi bisa diakses dengan mudah.

Adapun hasil penelitian ini sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 mengenai Informasi Pembangunan Daerah yaitu suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah. Data yang ada pada setiap daerah akan dikelola dengan teknologi berbasis elektronik dan dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengisian data hingga pemeriksaan datanya. Informasi pembangunan daerah ini akan dikelola langsung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Sistem informasi pemerintah daerah dalam informasi keuangan daerah

Penerapan SIPD di bidang pengelolaan keuangan daerah mencakup proses penganggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan pendapatan, dan pelaporan keuangan secara elektronik. Bappelitbangda telah menyusun anggaran tahunan sesuai kerangka kerja yang ditetapkan, meliputi rencana pengeluaran dan pendapatan daerah, serta melaksanakan pencatatan transaksi keuangan secara *real-time*. Namun, keterbatasan penguasaan teknis terhadap aplikasi SIPD menyebabkan sebagian proses pelaporan keuangan masih menggunakan SIMDA. Hal ini berpotensi mengurangi manfaat integrasi data keuangan yang diharapkan dari SIPD. Temuan ini konsisten dengan penelitian Nasution dan Nurwani (2021) yang menggarisbawahi bahwa migrasi dari sistem lama ke SIPD memerlukan pelatihan intensif, pendampingan teknis, dan adaptasi nomenklatur untuk menghindari hambatan operasional.

Secara normatif, Permendagri No. 77 Tahun 2020 mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban secara terintegrasi. Dengan demikian, kendala pada penguasaan SIPD di Bappelitbangda perlu segera diatasi untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi tersebut.

Sistem informasi pemerintah daerah pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kotamobagu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD pada Bappelitbangda Kota Kotamobagu berfungsi sebagai rangkaian perangkat lunak untuk mengelola, menyimpan, dan mengakses informasi terkait administrasi, layanan publik, keuangan, dan kebijakan daerah. Tujuan utama SIPD adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik.

Secara operasional, SIPD memberikan sejumlah manfaat, antara lain:

1. Efisiensi operasional melalui percepatan proses administrasi pemerintahan.
2. Peningkatan transparansi dengan menyediakan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat.
3. Perbaikan layanan publik dengan respons yang lebih cepat dan akses yang lebih mudah.
4. Pemantauan kinerja pemerintah daerah secara *real-time*.
5. Integrasi data antarperangkat daerah untuk menyajikan informasi yang lengkap dan akurat.
6. Kemudahan pengelolaan anggaran dan keuangan daerah secara terstruktur.
7. Dasar pengambilan keputusan strategis melalui analisis data yang komprehensif.
8. Dukungan perencanaan dan pengembangan infrastruktur dengan data yang relevan.

9. Penyederhanaan proses pelaporan dan peningkatan keselarasan antarprogram dan kebijakan.

Faktor pendukung implementasi SIPD di Bappelitbangda meliputi ketersediaan sumber daya, partisipasi pemangku kepentingan, infrastruktur teknologi yang memadai, keamanan informasi, kegiatan sosialisasi dan pelatihan, kebijakan dan regulasi pendukung, komitmen pimpinan, integrasi dengan sistem yang telah ada, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Kualitas keluaran (*output*) SIPD diukur dari akurasi informasi, keandalan sistem, ketersediaan data, dan kecepatan respons, yang seluruhnya memerlukan evaluasi berkala terhadap kebutuhan pengguna, efektivitas integrasi data, dan pemeliharaan keamanan informasi.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa penerapan SIPD di Bappelitbangda Kota Kotamobagu belum optimal. Hambatan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman pegawai terhadap aplikasi SIPD dan perubahan nomenklatur program/kegiatan yang membingungkan dalam proses penyusunan RKPD. Akibatnya, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah masih sering menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebagai sistem pendukung.

Temuan ini sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, yang mengatur bahwa SIPD harus mampu menyediakan informasi yang relevan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan penerapan SIPD memerlukan persiapan yang matang, meliputi:

- a. Penyiapan organisasi dan sumber daya manusia yang kompeten,
- b. Pemahaman mendalam mengenai mekanisme kerja SIPD,
- c. Ketersediaan perangkat keras (*hardware*) dan jaringan internet yang stabil, serta

- d. Penyediaan informasi daerah secara terstruktur dan digital agar dapat diakses lintas daerah.

Dengan demikian, untuk mengoptimalkan implementasi SIPD, diperlukan strategi peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendampingan teknis dari Kementerian Dalam Negeri, dan penyesuaian nomenklatur program yang lebih mudah dipahami oleh perangkat daerah.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu telah mencakup penyusunan dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, prioritas pembangunan, dan strategi daerah. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala adaptasi terhadap nomenklatur program yang baru.
2. Penerapan SIPD dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah memfasilitasi pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan secara elektronik sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Meskipun demikian, sebagian proses masih dilakukan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah karena keterbatasan penguasaan aplikasi SIPD.
3. Hambatan utama implementasi SIPD meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pemahaman teknis terhadap sistem, dan kebingungan akibat perubahan nomenklatur program. Kondisi ini menghambat efektivitas integrasi data dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Implikasi teoretis penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada literatur akuntansi sektor publik dan sistem informasi pemerintahan di konteks daerah berkembang yang baru bermigrasi dari sistem lama ke SIPD. Implikasi praktisnya adalah perlunya strategi peningkatan kapasitas SDM, penyederhanaan nomenklatur program, serta penguatan pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan agar implementasi SIPD dapat berjalan optimal.

Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan kajian komparatif implementasi SIPD di berbagai jenis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan daerah dengan tingkat kesiapan infrastruktur serta sumber daya manusia yang berbeda, guna merumuskan model penerapan SIPD yang efektif dan adaptif terhadap berbagai kondisi daerah.

Daftar pustaka

- Ahmad, L., & Munawir. (2018). *Sistem informasi manajemen*. Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh (KITA).
- Bahri, S. (2016). *Pengantar akuntansi*. Andi.
- Dela, A., & Juliana, N. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4036–4043.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3496>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Hanggara, A. (2019). *Pengantar akuntansi*. Jakad Media Publishing.
- Hantono, Inuzula, L., Husain, S. A., Widiasmara, A., Dhany, U. R., Sululing, S., Novitasari, M., Hendra, J., Amerieska, S., Suryaningsi, A., Amani, T., Ariyanto, S., Werastuti, D. N. S., & Muchlis, S. (2021). *Akuntansi sektor publik*. Media Sains Indonesia.

- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi pemerintah*. In Media.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Edisi terbaru. Andi.
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2). <https://ojs.unimal.ac.id/jak/article/view/4577>
- Nur, W. S. (2020). *Akuntansi dasar: Teori dan teknik penyusunan laporan keuangan*. Cendekia Publisher.
- Supriyadi, E. (2020). *Sistem informasi bisnis dunia versi 4.0*. Andi.
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi keperilakuan*. Gadjah Mada University Press.
- Suryadharma, & Budyastuti, T. (2019). *Sistem informasi manajemen*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Tukino, T., & Amrizal, A. (2017). Perancangan sistem informasi pelaporan transaksi online dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL pada PT Pos Indonesia (Persero) Batam 29400. *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 199–210. <https://doi.org/10.25077/TEKNOSI.v3i1.2017.199-210>
- Vitriana, N., Agustiawan, Ahyaruddin, M. (2022). Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *DIGIBIS: Digital Business Journal*, 1(1), 1-16. <http://dx.doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947>